

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Kota Pasuruan pada dasarnya merupakan bagian integral pembangunan regional Jawa Timur dan secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program pembangunan yang direncanakan di Kota Pasuruan, serta agar tetap mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Pasuruan, akan terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perbaikan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang telah disesuaikan dengan paradigma perkembangan pemerintahan, serta perundang-undangan yang berlaku dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan-penganggaran sebagai upaya pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, yaitu **"PASURUAN KOTA MADINAH (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya)"**. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Pasuruan 2021-2026 tersebut ditempuh melalui 4 (empat) Misi adalah sebagai berikut: **Misi Pertama: Kemandirian Ekonomi. Misi Kedua: Infrastruktur Berkelanjutan. Misi Ketiga: Sosial Masyarakat. Misi Keempat: Tatakelola Pemerintahan.**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dapat berfungsi sebagai pedoman dalam hal:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dalam rangka perencanaan sistem penganggaran dan belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dengan Pemerintah Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2021-2026, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan 2016-2021;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2021–2026 selanjutnya disebut Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021–2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi atau Kebijakan Umum serta tahapan Program-Kegiatan Strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Pasuruan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang disusun sesuai dengan kebutuhan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tahun 2021–2026 ditetapkan dengan maksud:

- a. Untuk menindaklanjuti Visi dan Misi serta rencana strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
- b. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- c. Mempermudah pelaksanaan koordinasi kegiatan yang mencakup monitoring, evaluasi, analisis yang dilaksanakan dengan instansi terkait;
- d. Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang rencana pembangunan tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan;
- e. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tahun 2021-2026 ini adalah:

- a. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tahun 2021-2026;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Draft Review Renstra Tahun 2021-2026

hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan 2021-2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi tentang tugas, fungsi struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, sumber daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, telaahan terhadap tugas, pokok dan fungsi, telaahan terhadap visi dan misi Walikota Pasuruan, telaahan terhadap Renstra Kementrian/lembaga terkait, telaahan terhadap rencana tata ruang dan wilayah Kota Pasuruan, serta isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi tentang program-program dan

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,
berisi tentang indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pasuruan 2021-2026

BABVIII PENUTUP

BAB II

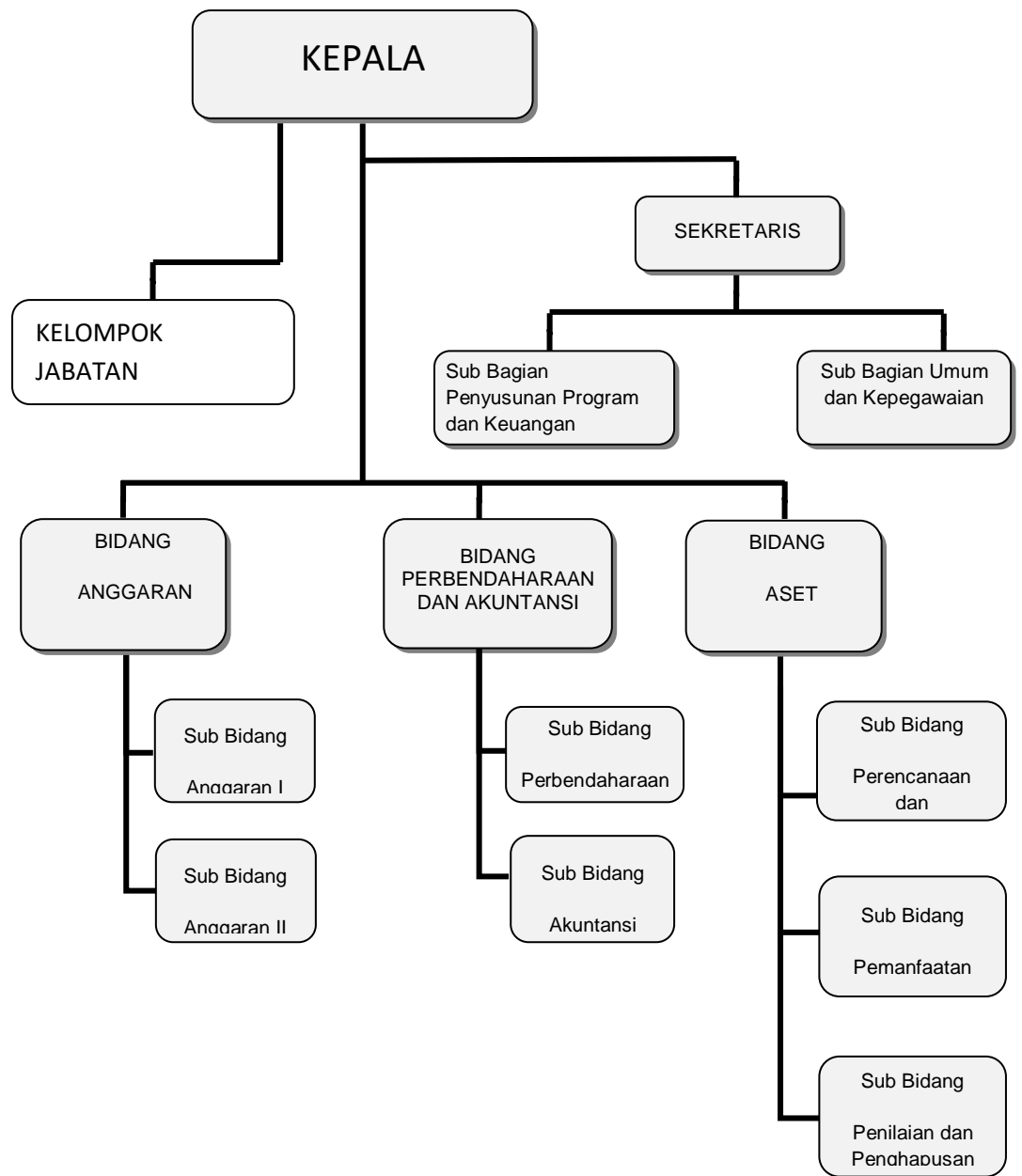
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kota Pasuruan, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset . Adapun tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan kegiatan penatusahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan sejumlah 42 orang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) dan Non ASN (TK dan PHL).

Tabel 2.1.

Klasifikasi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan status kepegawaian Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A,	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	18	13	31
	2. PPPK	-	-	-
B	Non ASN			
	1. Tenaga Kontrak (TK)	7	1	8
	2. Pegawai Harian Lepas (PHL)	2	1	3
	JUMLAH	27	15	42

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021

Tabel 2.2

Klasifikasi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan golongan Tahun 2021

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	5	2	7
2.	Golongan III	8	8	16
3.	Golongan II	5	3	8
	JUMLAH	18	13	31

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021

Tabel 2.3
Klasifikasi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3	-	-	-
2	Strata 2	4	2	6-
3	Strata 1	9	8	17
4	Diploma 3	-	1	1
5	Diploma 1	-	-	-
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	5	2	7
7	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	-	-	-
	JUMLAH	18	13	31

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021

Tabel 2.4
Klasifikasi PPPK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	-	-	-
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	-	-	-
6	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021

Tabel 2.5
Klasifikasi Pegawai Tenaga Kontrak Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset berdasarkan tingkat pendidikan Tahun
2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	2	1	3
3	Diploma 3	1	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	3	-	3

6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	1	-	1
	JUMLAH	7	1	8

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021

Tabel 2.6

Klasifikasi PHL Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	1	1	2
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	1	-	1
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	-	-	-
	JUMLAH	2	1	3

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021

b. Sumber Daya Asset/Modal (Sarana Prasarana)

Jumlah prasarana dan sarana kerja yang dimiliki (berdasarkan catatan inventaris kantor)

Tabel 2.7

Jumlah Prasarana dan Sarana Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan

No.	Prasarana dan Sarana	Tahun Pembangunan/ Pembuatan/ Pembelian	Jumlah
1.	Tanah Bangunan & tanah sawah	2001-2015 (Hibah)	456
2	Staion Wagon SUZUKI CARRY FUTURA	2002 (Pembelian)	1
3	Staion Wagon TOYOTA / KIJANG	2004 (Pembelian)	1
4	Mini Bus TOYOTA / KIJANG INNOVA	2017 (Pembelian)	1
5	Sepeda Motor SUZUKI / SHOGUN 110	2001 (Pembelian)	2
6	Sepeda Motor SUZUKI / SHOGUN 125	2009 (Pembelian)	2
7	Sepeda Motor HONDA / SUPRA NF 100	2003 (Pembelian)	1
8	Sepeda Motor HONDA / SUPRA NF 100	2005 (Pembelian)	1
9	Sepeda Motor HONDA REVO	2007 (Pembelian)	2
10	Sepeda Motor HONDA / NF 125 TD	2009 (Pembelian)	1
11	Sepeda Motor HONDA / NF 11 T11 CO1 MT	2016 (Pembelian)	1
12	Sepeda Motor HONDA / NF 11 T11 CO1 MT	2016 (Pembelian)	1
13	Sepeda Motor HONDA VARIO	2017 (Pembelian)	2
14	Mesin ketik manual portable	2008 (Pembelian)	2
15	Mesin ketik manual portable	2014 (Pembelian)	1

16	Lemari besi	2009 (Pembelian)	3
17	Lemari besi	2012 (Pembelian)	2
18	Lemari besi	2013 (Pembelian)	2
19	Lemari besi	2015 (Pembelian)	2
20	Rak besi/metal	2002 (Pembelian)	1
21	Rak besi/metal	2004 (Pembelian)	1
22	Rak besi/metal	2010 (Pembelian)	4
23	Rak besi/metal	2011 (Pembelian)	5
24	Rak besi/metal	2012 (Pembelian)	5
25	Rak Besi/Metal	2013 (Pembelian)	5
26	Rak Besi/Metal	2014 (Pembelian)	6
27	Rak Besi/Metal	2015 (Pembelian)	20
28	Rak kayu	2002 (Pembelian)	1
29	Rak Kayu	2015 (Pembelian)	1
30	Rak kayu	2016 (Pembelian)	1
31	Filling Besi/Metal	2009 (Pembelian)	1
32	Filling Besi/Metal	2010 (Pembelian)	2
33	Filling Besi/Metal	2015 (Pembelian)	2
34	Brand kas	2003 (Pembelian)	1
35	Brand kas	2010 (Pembelian)	1
36	Lemari kayu	2001 (Pembelian)	3
37	Lemari kayu	2012 (Pembelian)	1
38	Lemari kayu	2012 (Pembelian)	1
39	Papan visuil	2009 (Pembelian)	1
40	Alat penghancur kertas	2015 (Pembelian)	1
41	Papan nama instansi	2006(Pembelian)	1
42	Papan nama instansi	2009 (Pembelian)	1
43	Papan pengumuman	2004 (Pembelian)	1
44	Papan Pengumuman	2005 (Pembelian)	1
45	White board	2009 (Pembelian)	2
46	White board	2009 (Pembelian)	4
47	White Board	2012 (Pembelian)	1
48	Mesin absensi	2013 (Pembelian)	1
49	Mesin absensi	2016 (Pembelian)	1
50	Mesin absensi	2016 (Pembelian)	1
51	Display	2009 (Pembelian)	1
52	Genset	2014 (Pembelian)	1
53	Mesin pompa air	2005 (Pembelian)	1
54	Mesin pompa air	2014 (Pembelian)	2
55	Papan nama ruangan/jabatan	2009 (Pembelian)	2
56	Papan nama ruangan/jabatan	2009 (Pembelian)	4
57	Lemari kayu	2004 (Pembelian)	1
58	Lemari kayu	2008 (Pembelian)	1
59	Rak kayu	2013 (Pembelian)	1
60	Rak kayu	2013 (Pembelian)	1
61	Kursi kayu/rotan/bambu	2006 (Pembelian)	1
62	Meja rapat	2009 (Pembelian)	1
63	Meja rapat	2009 (Pembelian)	1
64	Meja tulis	2000 (Pembelian)	3
65	Meja tulis	2002 (Pembelian)	4
66	Meja tulis	2002 (Pembelian)	10
67	Meja podium	2006 (Pembelian)	1
68	Kursi rapat	2009 (Pembelian)	2
69	Kursi putar	2015 (Pembelian)	6
70	Kursi putar	2016 (Pembelian)	2
71	Bangku tunggu	2015 (Pembelian)	2
72	Kursi lipat elephant	2005 (Pembelian)	29

73	Kursi lipat chitosse	2012 (Pembelian)	50
74	Mebeler lainnya / joglo	2006 (Pembelian)	1
75	Gordyn	2013 (Pembelian)	2
76	Gordyn	2013 (Pembelian)	4
77	Gordyn	2013 (Pembelian)	9
78	Gordyn	2013 (Pembelian)	1
79	Rak TV	2012 (Pembelian)	1
80	Karpet	2014 (Pembelian)	2
81	Mesin penghisap debu/vacuum cleaner	2014 (Pembelian)	1
82	Mesin potong rumput	2014 (Pembelian)	1
83	Lemari es	2013 (Pembelian)	1
84	AC unit 2 PK	2012 (Pembelian)	1
85	AC unit 1 ½ PK	2012 (Pembelian)	3
86	AC unit 1 ½ PK	2012 (Pembelian)	1
87	AC unit 2 PK	2014 (Pembelian)	1
88	AC split	2005 (Pembelian)	1
89	AC split	2006 (Pembelian)	2
90	AC split 2 PK	2011 (Pembelian)	1
91	AC split 2 PK	2016 (Pembelian)	2
92	Exhause fan	2007 (Pembelian)	1
93	Exhause fan	2014 (Pembelian)	4
94	Dispenser	2012 (Pembelian)	2
95	Dispenser	2014 (Pembelian)	1
96	Televisi 21"	2007 Pembelian)	1
97	Televisi 32" LED	2014 (Pembelian)	1
98	Televisi 42" LED	2015 (Pembelian)	1
99	Alat rumah tangga lain-lain	2001 (Pembelian)	1
100	Alat rumah tangga lain-lain	2001 (Pembelian)	15
101	Alat rumah tangga lain-lain	2002 (Pembelian)	20
102	Alat rumah tangga lain-lain	2014 (Pembelian)	4
103	Alat rumah tangga lain-lain	2014 (Pembelian)	9
104	Alat rumah tangga lain-lain	2014 (Pembelian)	10
105	Alat rumah tangga lain-lain	2014 (Pembelian)	1
106	Alat pemadam portable	2002 (Pembelian)	1
107	Alat pemadam portable	2004 (Pembelian)	2
108	Alat pemadam portable	2005 (Pembelian)	1
109	Alat pemadam portable	2013 (Pembelian)	2
110	Alat pemadam portable	2014 (Pembelian)	2
111	Alat pemadam kebakaran	2002 (Pembelian)	1
112	Tangga	2014 (Pembelian)	1
113	Personal komputer lain-lain	2016 (Pembelian)	2
114	P.C unit/Komputer PC	2008 (Pembelian)	1
115	P.C unit/Komputer PC	2009 (Pembelian)	3
116	P.C unit/Komputer PC	2009 (Pembelian)	1
117	P.C unit/Komputer PC	2009 (Pembelian)	1
118	P.C unit/Komputer PC	2010 (Pembelian)	2
119	P.C unit/Komputer PC	2011 (Pembelian)	3
120	P.C unit/Komputer PC	2012 (Pembelian)	4
121	P.C unit/Komputer PC	2012 (Pembelian)	5
122	P.C unit/Komputer PC	2013 (Pembelian)	2
123	P.C unit/Komputer PC	2013 (Pembelian)	1
124	P.C unit/Komputer PC	2014 (Pembelian)	1
125	P.C unit/Komputer PC	2015 (Pembelian)	2
126	P.C unit/Komputer PC	2015 (Pembelian)	2
127	P.C unit/Komputer PC	2016 (Pembelian)	2
128	P.C unit/Komputer PC	2016 (Pembelian)	2
129	P.C unit/Komputer PC	2016 (Pembelian)	1

130	P.C unit/Komputer PC	2017 (Pembelian)	4
131	Laptop	2015 (Pembelian)	2
132	Laptop	2015 (Pembelian)	3
133	Laptop	2016 (Pembelian)	1
134	Laptop	2017 (Pembelian)	2
135	Note book	2008 (Pembelian)	1
136	Note book	2009 (Pembelian)	1
137	Note book	2009 (Pembelian)	1
138	Note book	2010 (Pembelian)	1
139	Note book	2012 (Pembelian)	1
140	Note book	2013 (Pembelian)	2
141	Note book	2013 (Pembelian)	3
142	Note book	2014 (Pembelian)	2
143	Printer	2007 (Pembelian)	1
144	Printer	2008 (Pembelian)	1
145	Printer	2008 (Pembelian)	1
146	Printer	2009 (Pembelian)	2
147	Printer	2009 (Pembelian)	3
148	Printer	2009 (Pembelian)	1
149	Printer	2010 (Pembelian)	2
150	Printer	2010 (Pembelian)	1
151	Printer	2010 (Pembelian)	1
152	Printer	2011 (Pembelian)	2
153	Printer	2011 (Pembelian)	1
154	Printer	2012 (Pembelian)	1
155	Printer	2012 (Pembelian)	1
156	Printer	2013 (Pembelian)	1
157	Printer	2014 (Pembelian)	1
158	Printer	2014 (Pembelian)	1
159	Printer	2016 (Pembelian)	1
160	Printer	2017 (Pembelian)	2
161	Printer	2017 (Pembelian)	1
162	Printer	2017 (Pembelian)	1
163	Scanner	2015 (Pembelian)	1
164	Flashdisk	2009 (Pembelian)	5
165	Monitor	2015 (Pembelian)	1
166	Monitor	2016 (Pembelian)	1
167	Printer	2013 (Pembelian)	1
168	Printer	2013 (Pembelian)	1
169	Printer	2014 (Pembelian)	1
170	Printer	2014 (Pembelian)	1
171	Printer	2014 (Pembelian)	1
172	Printer	2015 (Pembelian)	3
173	Printer	2015 (Pembelian)	1
174	Printer	2015 (Pembelian)	1
175	Printer	2015(Pembelian)	1
176	Printer	2015 (Pembelian)	1
177	Scanner	2016 (Pembelian)	1
178	UPS	2009 (Pembelian)	4
179	UPS	2010 (Pembelian)	2
180	UPS	2013 (Pembelian)	2
181	UPS	2013 (Pembelian)	1
182	UPS	2014 (Pembelian)	7
183	UPS	2014 (Pembelian)	7
184	UPS	2014 (Pembelian)	1
185	UPS	2015 (Pembelian)	6
186	UPS	2015 (Pembelian)	1

187	UPS	2015 (Pembelian)	2
188	Server	2009 (Pembelian)	1
189	Server	2015 (Pembelian)	1
190	Router	2016 (Pembelian)	1
191	Switch hub	2016 (Pembelian)	1
192	Meja kerja pejabat eselon II	2000 (Pembelian)	1
193	Meja kerja pejabat eselon III	2008 (Pembelian)	4
194	Meja kerja pejabat eselon IV	2006 (Pembelian)	5
195	Meja kerja pejabat eselon IV	2008 (Pembelian)	7
196	Meja kerja	2009 (Pembelian)	1
197	Meja kerja	2015 (Pembelian)	4
198	Meja kerja	2016 (Pembelian)	2
199	Meja kerja	2017 (Pembelian)	5
200	Meja tamu ruangan biasa	2009 (Pembelian)	1
201	Kursi kerja pejabat eselon II	2004 (Pembelian)	1
202	Kursi kerja pejabat eselon III	2008 (Pembelian)	5
203	Kursi kerja pejabat eselon III	2017 (Pembelian)	1
204	Kursi kerja pejabat eselon IV	2006 (Pembelian)	3
205	Kursi kerja pejabat eselon IV	2017 (Pembelian)	8
206	Kursi kerja pejabat eselon V	2007 (Pembelian)	6
207	Kursi tamu di ruangan pejabat eselon II	2006 (Pembelian)	1
208	Buffet kayu	2002 (Pembelian)	1
209	Proyektor + attachment	2011 (Pembelian)	1
210	Proyektor + attachment	2013 (Pembelian)	1
211	Proyektor + attachment	2015 (Pembelian)	1
212	Proyektor + attachment	2016 (Pembelian)	1
213	Peralatan studio visual lain-lain	2005 (Pembelian)	1
214	Peralatan studio visual lain-lain	2006 (Pembelian)	1
215	Peralatan studio visual lain-lain	2013 (Pembelian)	1
216	Peralatan studio visual lain-lain	2015 (Pembelian)	1
217	Handycam	2010 (Pembelian)	1
218	Handycam	2013 (Pembelian)	1
219	Camera electronic	2011 (Pembelian)	1
220	Camera electronic	2013 (Pembelian)	1
221	Camera electronic	2016 (Pembelian)	1
222	Camera film	2010 (Pembelian)	1
223	Telephone (PABX)	2016 (Pembelian)	1
224	Pesawat telephone	2013 (Pembelian)	2
225	Faksimile	2009 (Pembelian)	1
226	Faksimile	2010 (Pembelian)	1
227	Faksimile	2016 (Pembelian)	1
228	CCTV	2013 (Pembelian)	1
229	CCTV	2016 (Pembelian)	1
230	Bangunan gedung kantor permanen	2002 (Pembelian)	1
231	Bangunan gedung kantor permanen	2002 (Pembelian)	1
232	Bangunan gedung kantor permanen	2003 (Pembelian)	1
233	Bangunan gedung kantor lain-lain	2007 (Pembelian)	1
234	Bangunan gedung kantor lain-lain	2007 (Pembelian)	1
235	Bangunan gedung tempat pertemuan permanen	2002 (Pembelian)	1
236	Konstruksi pagar	2008 (Pembelian)	1
237	Konstruksi pagar	2010 (Pembelian)	1
238	Rumah negara golongan III type D permanen	2002 (Pembelian)	1
239	Instalasi air tanah dangkal kapasitas kecil	2006 (Pembelian)	1
240	Jaringan distribusi tegangan di atas 20	2003 (Pembelian)	1

	KVA		
241	Jaringan telepon di atas tanah kapasitas kecil	2006 (Pembelian)	1
242	Hukum	2013 (Pembelian)	28
243	Hukum	2014 (Pembelian)	24
244	Alat tenis meja	2015 (Pembelian)	1

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan yang dihasilkan dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD (Satuan)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6						7					8 (=7:6)				
1	Prosentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan PD dengan realisasi diatas 90%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase laporan keuangan PD sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase PD tertib administrasi barang/aset daerah sesuai Permendagri 19 tahun 2016				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4

Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2					3					4 (=3:2)				
BELANJA DAERAH	9.742.776	7.173.956	9.755.769	13.410.709	9.737.742	8.458.030	6.097.156	6.659.149	9.255.373	6.106.311	86,81%	84,99%	68,26%	69,01%	62,71%
Belanja Tidak Langsung															
- Belanja pegawai	3.741.001	2.791.139	3.407.477	4.487.897	4.192.463	3.447.208	2.710.338	3.207.183	3.521.528	3.829.274	92,15%	97,11%	94,12%	78,47%	91,34%
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung															
- Belanja pegawai	559.625	711.475	195.200	359.061	268.721	440.950	459.225	26.425	135.591	214.831	78,79%	64,55%	13,54%	37,76%	79,95%
- Belanja barang dan jasa	3.416.993	3.381.950	5.967.735	8.334.941	4.974.261	2.965.256	2.659.716	3.322.191	5.422.355	1.835.889	86,78%	78,64%	55,67%	65,06%	36,91%
- Belanja modal	2.025.157	289.392	185.358	228.810	302.297	1.604.616	267.878	103.350	175.899	226.317	79,23%	92,57%	55,76%	76,88%	74,87%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/Potensi (Strength)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Kelemahan (Weaknes)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;

2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang (Opportunity)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

b. Tantangan/Ancaman (Treath)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD;

3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, maka peranan BPKA sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rendahnya kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah terkait penyusunan anggaran
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi perbendaharaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak tepat waktu
3. Perlunya SOP Pengelolaan Aset Daerah dan rendahnya kapasitas perangkat daerah terkait Pelaporan Barang Milik Daerah yang tidak tepat waktu , serta pengelolaan data aset yang belum tertib

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan
 untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
 Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Rendahnya kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah terkait penyusunan anggaran	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan manajemen tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan, dan aset
		Pelaksanaan kegiatan administrasi perbendaharaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak tepat waktu	
		Perlunya SOP Pengelolaan Aset Daerah dan rendahnya kapasitas perangkat daerah terkait Pelaporan Barang Milik Daerah yang tidak tepat waktu , serta pengelolaan data aset yang belum tertib	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada dasarnya penyusunan renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan untuk mendukung percepatan pencapaian dari visi, misi walikota dan wakil walikota terpilih. Begitu juga dengan pelaksanaan program dan kegiatan diupayakan untuk mendukung program dan kegiatan

Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026, yaitu :

“MENJADIKAN KOTA PASURUAN MAJU, INDAH DAN HARMONIS”

Pengertian terhadap visi tersebut yaitu:

Sinergitas antar sektor ekonomi, diharapkan semakin memberikan peluang pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kontribusinya bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk lebih meningkatkan daya saing Kota Pasuruan dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Salah satu misi Walikota dan Wakil Walikota yang terkait langsung dengan bidang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 adalah **misi ke 4**, yaitu **“Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif”** Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi birokrasi dan pelayanan publik, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dengan didukung sumberdaya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan

penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah ” Kepatuhan Laporan Keuangan (WTP) ”. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah “Mewujudkan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi informasi”.

Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah Opini BPK terhadap LKPD. Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan barang daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta tertib administrasi keuangan dan barang daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Pasuruan merupakan kota pesisir dengan luas wilayah sebesar 36,58 km² atau 0,07% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota Pasuruan terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Panggungrejo dengan 34 (tiga puluh empat) kelurahan.

Secara geografis, wilayah Kota Pasuruan terletak antara 112°45’ - 112°55’ BT dan 7°35’ - 7°45’ LS dan berada pada

ketinggian ± 4 m dari permukaan laut serta terletak pada pertigaan jalur regional Surabaya, Probolinggo dan Malang. Jarak ke Surabaya sekitar 60 km, ke Probolinggo 38 km dan ke Malang 54 km. adapun batas-batas Kota Pasuruan meliputi :

1. Sebelah Utara, Selat Madura yang membentang memisahkan wilayah kota dengan Pulau Madura;
2. Sebelah Timur, Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
3. Sebelah Barat, Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
4. Sebelah Selatan, Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan mengamanatkan pembagian yang proporsional antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Perencanaan pola ruang terbagi menjadi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya dimana rencana kawasan lindung di Kota Pasuruan meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. Sedangkan kawasan budidaya di Kota Pasuruan terbagi menjadi kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, industry, perkantoran, pariwisata, pesisir, pertanian, peruntukan pelayanan umum, dan peruntukan sector informal. Berdasarkan uraian tersebut, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tidak ada keterkaitan secara langsung dengan konsep yang mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan tahun 2021-2026, adalah : **“Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan manajemen tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan, dan aset,”** yang bisa dijabarkan sebagai berikut :

- a. Rendahnya kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah terkait penyusunan anggaran
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi perbendaharaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak tepat waktu
- c. Perlunya SOP Pengelolaan Aset Daerah dan rendahnya kapasitas perangkat daerah terkait Pelaporan Barang Milik Daerah yang tidak tepat waktu , serta pengelolaan data aset yang belum tertib

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja PD selama lima tahun.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu:

“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel		Opini atas audit BPK						
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan telah menetapkan strategi antara lain :

- a. Rendahnya kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah terkait penyusunan anggaran
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi perbendaharaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak tepat waktu
- c. Perlunya SOP Pengelolaan Aset Daerah dan rendahnya kapasitas perangkat daerah terkait Pelaporan Barang Milik Daerah yang tidak tepat waktu , serta pengelolaan data aset yang belum tertib

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berhasil tidaknya

suatu rencana strategis akan sangat tergantung jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya		
MISI IV	Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan birokrasi yang dinamis berbasis teknologi informasi	1. Membangun kapasitas manajemen pemerintah yang adaptif dan profesional	Mengembangkan system pemerintahan yang dinamis dan adaptif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan menguatkan inovasi pelayanan keseluruhan layanan masyarakat berbasis digitalisasi	
	2. Integrasi digitalisasi pada pelayanan publik		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber-daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, *outcomes* mapupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif) disajikan pada table 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota, di mana tujuan dari penyusunan Rencana Strategis PD adalah untuk mensukseskan program pembangunan kota. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Bila dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pasuruan (RPJMD) Tahun 2021-2026, keterkaitannya dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 adalah pada Misi ke-4 dari RPJMD Kota Pasuruan yaitu:

“Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif”

Tujuan ke 6 yaitu:

“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel”

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator kinerja yang mengacu pada tujuan, sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset ini disusun sesuai dengan keadaan saat ini. Adapun perubahan kondisi lingkungan dalam jangka pendek tentunya dapat diantisipasi pula melalui Rencana Kegiatan Tahunan atau program kerja yang disusun pada setiap tahun anggaran.

Mudah-mudahan dengan tersusunnya Rencana Strategis ini akan memudahkan arah kerja staf dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran (goal) yang diinginkan sebagai wujud pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan. Kerjasama dan tumbuhnya rasa memiliki serta tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas akan meningkatkan motivasi kerja. Oleh karena itu dengan adanya arah yang jelas dan terukur maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga bermanfaat sesuai rentang waktu yang ditentukan dalam rencana ini.

Pasuruan, 2021
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN

Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199003 1 006

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pengelo
Tahun 2021-2026
Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	2021		2022	
										target	Rp (juta)	target	Rp (juta)
										(7)	(8)		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi					
		5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu					
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dok	5,057,280	4 dok	5,815,872	
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	4 dok	5,057,280	4 dok	5,815,872	
		5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip in aktif BPKA yang tertata rapi dan tersusun rapi	1.000 dos arsip	13,057,200	1.000 dos arsip	15,015,780	
		5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu					
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangannya	14 bln	4,487,448,700	14 bln	5,160,566,005	
		5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun	12 dok	5,999,850	12 dok	6,899,828	
								Jumlah laporan keuangan tribulan yang disusun	4 dok		4 dok		
		5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	2 dok	4,399,830	2 dok	5,059,805	
		5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	4 dok	7,571,700	4 dok	8,707,455	

							Jumlah dokumen pelaporan barang OPD dan pengelolaan kepegawaian yang tersusun		7 jenis		7 jenis	
		5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 lap	3,412,800	1 lap	3,924,720
		5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya				
		5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani	12 bln	41,400,000	12 bln	47,610,000
		5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus keuangan dan BMD	3 org	15,000,000	3 org	17,250,000
		5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran				
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10 jenis	1,101,000	10 jenis	1,266,150
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang, cetakan dan penggandaan yang tersedia	18 jenis	115,069,000	18 jenis	132,329,350
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4 jenis	3,618,000	4 jenis	4,160,700
		5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	320 kotak	8,000,000	320 kotak	9,200,000
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	428 kali	157,633,000	428 kali	181,277,950
		5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 unit	70,239,600	8 unit	80,775,540
		5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia untuk surat menyurat	450 lembar	2,700,000	450 lembar	3,105,000
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12 bln	132,840,089	12 bln	152,766,102

		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran		9 org	291,006,350	9 org	334,657,303
								Jumlah pembelian kebutuhan peralatan dan bahan pembersih kantor yang tersedia		28 jenis		28 jenis	
								Jumlah alat kesehatan habis pakai yang tersedia		4 jenis		4 jenis	
								Jumlah bahan obat-obatan yang tersedia		1 jenis		1 jenis	
								Jumlah alat tulis yang tersedia		69 jenis		69 jenis	
		5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara					
		5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		20 unit	193,187,258	20 unit	222,165,347
								Jumlah jasa STNK kendaraan dinas operasional yang terbayarkan		20 unit		20 unit	
		5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan furniture/meubeler yang terpelihara		50 unit	3,556,000	50 unit	4,089,400
		5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		125 unit	26,950,749	125 unit	30,993,361
		5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Volume gedung kantor yang terpelihara		3.170 m2	31,203,450	3.170 m2	35,883,968
		5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu					
		5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD					
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen kebijakan umum APBD dan PPAS APBD yang tersusun		2 dok	40,695,390	2 dok	46,799,699

		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang tersusun		2 dok	52,700,130	2 dok	60,605,150
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen rancangan APBD dan penjabaran APBD yang tersusun		4 dok	289,517,190	4 dok	332,944,769
								Prosentase kelancaran sistem informasi keuangan daerah		90%		90%	
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen rancangan perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD yang tersusun		4 dok	216,099,760	4 dok	248,514,724
		5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah pengelola keuangan daerah yang mengikuti pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan anlikasi		82 org	166,932,480	82 org	191,972,352
		5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang tersusun		2 dok	138,087,850	2 dok	158,801,028
								Jumlah PD yang dilayani		12bln		12bln	
								Persentase proses anggaran yang diusulkan oleh SKPD		90%		90%	
		5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penerbitan SP2D					
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya pelayanan perbendaharaan dan kas daerah		12 bln	101,024,380	12 bln	116,178,037
		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah laporan realisasi penerimaan, belanja dan pembiayaan daerah		1 buku	77,017,700	1 buku	88,570,355
								Jumlah dokumen tentang pelaporan keuangan daerah Kota Pasuruan yang tersusun		3 dok		3 dok	

		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah bank yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan daerah kota Pasuruan		4 kali	32,349,500	4 kali	37,201,925
		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan penatausahaan keuangan		5 keg	256,978,800	5 keg	295,525,620
								Jumlah peserta bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		110 org		110 org	
		5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah					
		5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen pembukuan dan penerbitan pelaporan daerah yang diterbitkan		2 dok	42,412,460	2 dok	48,774,329
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 dan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang tersusun		2 dok	138,471,700	2 dok	159,242,455
								Jumlah SKPD yang mengajukan surat pengajuan dana		33 PD		33 PD	
		5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rapat evaluasi atas laporan penyerapan realisasi anggaran APBD		11 kali	76,139,400	11 kali	87,560,310
		5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran yang tersusun		1 dok	37,209,800	1 dok	42,791,270
		5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyusunan draft dan finalisasi laporan keuangan		100 org	414,288,500	100 org	476,431,775
		5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						

		5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Penambahan dana cadangan dari jasa giro deposito dana cadangan		100%	3,500,000,000	100%	3,500,000,000
		5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu					
		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD dalam monitoring pemanfaatan barang milik daerah		33 PD	34,123,850	33 PD	39,242,428
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah kasus kerugian daerah yang dapat diselesaikan		20 kasus	152,897,110	20 kasus	175,831,677
								Jumlah bangunan pasar yang diasuransikan		8 unit		8 unit	
								Jumlah gedung kantor yang diasuransikan		50 gedung		50 gedung	
								Jumlah kendaraan roda 4 yang diasuransikan		100 unit		100 unit	
								Jumlah tanah aset yang disertifikatkan		30 bidang		30 bidang	
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang dilakukan penilaian/ appraisal		50 bidang	49,848,860	50 bidang	57,326,189
		5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah proses penghapusan BMD yang diusulkan oleh SKPD		12 kali	89,999,640	12 kali	103,499,586
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD dalam rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah		33 PD	165,556,980	33 PD	190,390,527
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen tentang laporan tribulan barang milik daerah yang tersusun		4 dok	24,142,570	4 dok	27,763,956
		5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang terlibat dalam pendampingan manajemen barang milik daerah		33 PD	475,463,140	33 PD	546,782,611
								Jumlah SKPD yang terlibat dalam pembinaan pejabat penatausahaan barang milik daerah		33 PD		33 PD	

laan Keuangan dan Aset

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja Pada Kahir Periode (2021)	Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
2023		2024		2025		2026				
target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
				(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)
4 dok	6,688,253	4 dok	7,691,491	4 dok	8,845,214	4 dok	10,171,996	-	BPKA	
4 dok	6,688,253	4 dok	7,691,491	4 dok	8,845,214	4 dok	10,171,996	-	BPKA	
1.000 dos arsip	17,268,147	1.000 dos arsip	19,858,369	1.000 dos arsip	22,837,124	1.000 dos arsip	26,262,693	1.000 dos arsip	BPKA	
14 bln	5,934,650,906	14 bln	6,824,848,542	14 bln	7,848,575,823	14 bln	9,025,862,196	8 bln	BPKA	
12 dok	7,934,802	12 dok	9,125,022	12 dok	10,493,775	12 dok	12,067,841	-	BPKA	
4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		-		
2 dok	5,818,775	2 dok	6,691,591	2 dok	7,695,330	2 dok	8,849,630	-	BPKA	
4 dok	10,013,573	4 dok	11,515,609	4 dok	13,242,951	4 dok	15,229,393	2 dok	BPKA	

7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		2 jenis		
1 lap	4,513,428	1 lap	5,190,442	1 lap	5,969,009	1 lap	6,864,360	-	BPKA	
12 bln	54,751,500	12 bln	62,964,225	12 bln	72,408,859	12 bln	83,270,188	-	BPKA	
3 org	19,837,500	3 org	22,813,125	3 org	26,235,094	3 org	30,170,358	-	BPKA	
10 jenis	1,456,073	10 jenis	1,674,483	10 jenis	1,925,656	10 jenis	2,214,504	10 jenis	BPKA	
18 jenis	152,178,753	18 jenis	175,005,565	18 jenis	201,256,400	18 jenis	231,444,860	18 jenis	BPKA	
4 jenis	4,784,805	4 jenis	5,502,526	4 jenis	6,327,905	4 jenis	7,277,090	4 jenis	BPKA	
320 kotak	10,580,000	320 kotak	12,167,000	320 kotak	13,992,050	320 kotak	16,090,858	100 kotak	BPKA	
428 kali	208,469,643	428 kali	239,740,089	428 kali	275,701,102	428 kali	317,056,268	150 kali	BPKA	
8 unit	92,891,871	8 unit	106,825,652	8 unit	122,849,499	8 unit	141,276,924	-	BPKA	
450 lembar	3,570,750	450 lembar	4,106,363	450 lembar	4,722,317	450 lembar	5,430,664	175 lembar	BPKA	
12 bln	175,681,018	12 bln	202,033,170	12 bln	232,338,146	12 bln	267,188,868	6 bln	BPKA	

9 org	384,855,898	9 org	442,584,283	9 org	508,971,925	9 org	585,317,714	8 org	BPKA	
28 jenis		28 jenis		28 jenis		28 jenis		19 jenis		
4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		
1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		
69 jenis		69 jenis		69 jenis		69 jenis		45 jenis		
20 unit	255,490,149	20 unit	293,813,671	20 unit	337,885,722	20 unit	388,568,580	20 unit	BPKA	
20 unit		20 unit		20 unit		20 unit		12 unit		
50 unit	4,702,810	50 unit	5,408,232	50 unit	6,219,466	50 unit	7,152,386	50 unit	BPKA	
125 unit	35,642,366	125 unit	40,988,720	125 unit	47,137,028	125 unit	54,207,583	85 unit	BPKA	
3.170 m2	41,266,563	3.170 m2	47,456,547	3.170 m2	54,575,029	3.170 m2	62,761,283	3.170 m2	BPKA	
2 dok	53,819,653	2 dok	61,892,601	2 dok	71,176,491	2 dok	81,852,965	-	BPKA	

2 dok	69,695,922	2 dok	80,150,310	2 dok	92,172,857	2 dok	105,998,785	-	BPKA	
4 dok	382,886,484	4 dok	440,319,456	4 dok	506,367,375	4 dok	582,322,481	-	BPKA	
90%		90%		90%		90%		-		
4 dok	285,791,933	4 dok	328,660,722	4 dok	377,959,831	4 dok	434,653,805	-	BPKA	
82 org	220,768,205	82 org	253,883,436	82 org	291,965,951	82 org	335,760,843	-	BPKA	
2 dok	182,621,182	2 dok	210,014,359	2 dok	241,516,513	2 dok	277,743,990	-	BPKA	
12bln		12bln		12bln		12bln		8 bln		
90%		90%		90%		90%		90%		
12 bln	133,604,743	12 bln	153,645,454	12 bln	176,692,272	12 bln	203,196,113	6 bln	BPKA	
1 buku	101,855,908	1 buku	117,134,294	1 buku	134,704,439	1 buku	154,910,104	-	BPKA	
3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		-		

100%	3,500,000,000	100%	3,500,000,000	100%	3,500,000,000	100%	3,500,000,000		BPKA	
33 PD	45,128,792	33 PD	51,898,110	33 PD	59,682,827	33 PD	68,635,251	33 PD	BPKA	
20 kasus	202,206,428	20 kasus	232,537,392	20 kasus	267,418,001	20 kasus	307,530,701	-	BPKA	
8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		-		
50 gedung		50 gedung		50 gedung		50 gedung		50 gedung		
100 unit		100 unit		100 unit		100 unit		100 unit		
30 bidang		30 bidang		30 bidang		30 bidang		-		
50 bidang	65,925,117	50 bidang	75,813,885	50 bidang	87,185,968	50 bidang	100,263,863	-	BPKA	
12 kali	119,024,524	12 kali	136,878,202	12 kali	157,409,933	12 kali	181,021,423	-	BPKA	
33 PD	218,949,106	33 PD	251,791,472	33 PD	289,560,193	33 PD	332,994,222	33 PD	BPKA	
4 dok	31,928,549	4 dok	36,717,831	4 dok	42,225,506	4 dok	48,559,332	2 dok	BPKA	
33 PD	628,800,003	33 PD	723,120,003	33 PD	831,588,004	33 PD	956,326,204	33 PD	BPKA	
33 PD		33 PD		33 PD		33 PD		-		

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2026	
9	10
100%	
100%	
100%	